

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang berdaulat adil dan makmur pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yaitu sebagai wujud dari *good governance*. Konsep *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut *good governance* (keperintahan yang baik), wujud dari *good governance* merupakan komitmen semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat (Sedarmayanti, 2012:2)

Dalam mewujudkan *good governance* tersebut diperlukan aset yang memadai. Aset tersebut termasuk aset lancar maupun aset tetap. Aset yang digolongkan menjadi aset tetap merupakan aset yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, mempunyai nilai yang cukup material serta digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari. Aset tetap tersebut dalam penggunaannya harus berpedoman dengan peraturan pemerintah sesuai dengan PSAP No 7 yang didalamnya mengatur pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan. PSAP No 7 ini terdapat pada lampiran Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005. PP No 71 tahun 2010 ini akan memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan di Indonesia, perubahan yang paling mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah perubahan basis akuntansi. Pada PP No. 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang dianut adalah basis akrual (Deputi Pengawasan Bidang penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, 2014:1).

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dimana pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas diakui pada saat transaksi terjadi. Akuntansi berbasis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan

yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas dan tujuan pelaporan manajerial dan pengawasa keuangan. Namun, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tidak lepas dari hambatan-hambatan. Hambatan tersebut seperti, kompleksitas laporan keuangan dan kondisi pemerintahan.

BNN Kota Surabaya merupakan lembaga pemerintah yang tergolong masih baru, karena di bentuk menjadi lembaga pemerintah non kementerian secara vertikal di bawah langsung oleh presiden pada tahun 2009 dan saat ini harus bisa berjalan sesuai peraturan pemerintah dengan SDM yang sangat terbatas. BNN dibentuk presiden karena dinilai bahwa Indonesia sudah memasuki zona dimana dikatakan bahwa Indonesia darurat Narkotika. Oleh Karena itu, cukup menarik untuk melihat aset tetap yang terdapat pada BNN Kota Surabaya dalam menjalankan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjadi satuan kerja yang *good governance* maka Perlakuan aset tetap pada BNN Kota Surabaya harus berpedoman pada PP No. 71 tahun 2010 dengan PSAP No 7 sebagai acuan dalam perlakuan aset tetapnya. Salah satu permasalahan yang terjadi saat ini adalah Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya masih diragukan dalam hal pelaporan aset tetapnya. Karena dari awal berdirinya BNN Kota Surabaya terdapat salah penggunaan metode penilaian awal saat entitas pertama kali berdiri serta terdapat kesalahan penggolongan aset tetap sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil pada pelaporan aset tetapnya.

Seluruh instansi pemerintah yang menyajikan laporan keuangan tentang aset tetap yang mencakup pengakuan, pengukuran, penilaian dan penyajiannya serta pengungkapan maka menggunakan PP No. 71 tahun 2010 pernyataan No. 07 tentang aset tetap.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi perlakuan aset tetap pada BNN Kota Surabaya. Oleh karena itu, judul penelitian ini yaitu Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada BNN Kota Surabaya”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada BNN Kota Surabaya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap dengan standar yang berlaku yaitu PSAP No. 07 yang diterapkan pada BNN Kota Surabaya.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, terdapat tiga manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis, manfaat empiris dan manfaat kebijakan. Berikut masing-masing manfaat yang didapatkan sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan terhadap kajian akuntansi pemerintahan khususnya perlakuan akuntansi aset tetap di lingkungan pemerintahan di BNN Kota Surabaya. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi civitas akademika yang juga melakukan penelitian dengan bahasan sejenis.

### 2. Manfaat Empiris

Secara empiris, penelitian ini dapat membantu Pemerintah khususnya di BNN Kota Surabaya dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) khususnya aset tetap. Hal ini diharapkan akan menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, relevan dan jelas.

### 3. Manfaat Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diharapkan pemerintah khususnya di lingkungan BNN Kota Surabaya akan mendapatkan manfaat yang menjadi

dasar dalam mengambil kebijakan dalam membuat perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan dalam PSAP No. 07.

### **1.5 Sistematika Skripsi**

Pada penelitian ini, pembahasan menggunakan beberapa bab yang disusun secara sistematis.. Berikut bab yang akan dibahas antara lain:

#### **Bab 1 Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang permasalahan akuntansi di kawasan dinas pemerintah yaitu di BNN Kota Surabaya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

#### **Bab 2 Tinjauan Pustaka**

Bab ini mendeskripsikan penelitian sejenis yang telah dilakukan terkait perlakuan akuntansi aset tetap di berbagai instansi. Penelitian sejenis digunakan sebagai tolak ukur dalam mencari celah hasil penelitian. Peneliti mencari kesamaan dan perbedaan dari penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini diharapkan akan membantu kerangka berfikir peneliti dalam menemukan hasil yang diharapkan.

#### **Bab 3 Metode Penelitian**

Bab ini mendeskripsikan pendekatan yang relevan pada penelitian ini. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dalam proses pencarian data hingga penulisan hasil. Data yang digunakan adalah data berbentuk laporan keuangan dari BNN Kota Surabaya serta data dokumen terkait kebijakan akuntansi. Data yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Berdasarkan sumber yang telah dikumpulkan, maka peneliti akan melakukan pemetaan hasil dan mendapatkan kesimpulan yang diharapkan.

#### **Bab 4 Hasil dan Pembahasan**

Bab ini mendeskripsikan tentang keseluruhan dari penelitian meliputi struktur, kebijakan, aktifitas, serta perlakuan akuntansi aset tetap terhadap pemerintah khususnya di BNN Kota Surabaya. Bab ini juga menjelaskan hasil yang sudah

melalui tahap analisis dan penafsiran dari data yang dikumpulkan setelah dibandingkan dengan PSAP No. 07 dan teori akuntansi yang mampu menjawab permasalahan perlakuan akuntansi aset tetap dan penulisan laporan keuangan yang ada.

#### Bab 5 Simpulan dan Saran

Bab ini mendeskripsikan simpulan dari pembahasan penelitian ini. berdasarkan hasil yang ada, maka peneliti akan menyampaikan temuan baru serta saran yang akan diberikan kepada pihak pemerintah di BNN Kota Surabaya. hal ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak agar perlakuan akuntansi aset tetap di instansi tersebut akan semakin baik ke depan.